

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amalia, N. S. H. , M. Hum., & Prof. Dr. Jamaluddin, S. H. , M. Hum. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (S. A. S. H. , M. H. Dr. Faisal, Ed.). Unimal Press.
- Bustami, S. H. , M. A., Fitriani, R. S. H. , M. H., & Sahara, S. S. H. , M. H. (2020). *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Liza Agnesta Krisna, Ed.). Deepublish.
- Dr. Atmoko, D. S. H. , M. H., & Baihaki, A. S. H. I. M. H. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Z. R. Bahar, Ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Dr. H. Khoirul Abror, M. H. (2020). *HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN*. Bening Pustaka.
- Dr. H. Wardiansyah, G. S. H. , M. H. , M. M. (2023). *Antara Poligami dan Monogami*. Ruang Karya Bersama.
- Dr. Nurtjahjo, A. S. T. , S. H. , M. H. , M. M., Dr. Royani, E. S. H. , S. Pd. m M. Pd. , M. H. , C. PS. , C. Me. , C. HTc. , C. Mt., & Prof. Dr. Damayanti, D. (2024). *Perselingkuhan dan Zina di Kalangan Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, dan Pegawai BUMN: Hukum dan Etika*. Amerta Media.
- Hajati, S., Poespasari, E. D., & Moechthar, O. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia* (Airlangga University Press, Ed.).
- Khoiriyah, N. (2016). *Lembaga Perkawinan Poligami di Negara Modern* (Prisma Media Utama, Ed.).
- M. Friedman, L. (2021). *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Nasareno Lakapu, D. (2024). *Dinamika Kepuasan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara: Tantangan dan Solusi*. Amerta Media.
- Soeroso, R. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Susanti, Dr. D. I. S. H. , M. Hum. , M. Pd. (2019). *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Sinar Grafika.
- Utriza Yakin, A. DEA. , Ph. D. (2016). *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad*. KENCANA.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

C. Sumber lainnya

Hasibuan, H. A. L. (2023). *METODE PENAFSIRAN HUKUM SEBAGAI ALAT MENCARI KEADILAN HAKIKI*. 15.

Matnuh, H. (2016). Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukum Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).

Pasyah, T. , & D. D. (2024). Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan. *Thengkyang*, 9(1), 27–29.

Riyanto, A. (2019). *Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil*. 10, 1–12.